



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4485-4492

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa untuk Mencegah Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Mahasiswa

I Gusti Ngurah Sandy Esa Darmawan¹, Dini Amelia Rahmawati Prasetya², Hafiz Ellyan Suroso³, Fiska Rani⁴,
Mutia Febriyani⁵

Pendidikan Dokter, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
esadarmaputra77@gmail.com

Abstrak

Radikalisme dan intoleransi di lingkungan perguruan tinggi Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam satu dekade terakhir sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ideologi bangsa dan identitas kebangsaan generasi muda. Mahasiswa menjadi kelompok yang rentan karena berada dalam fase pencarian jati diri, mudah terpapar arus informasi digital yang tidak terverifikasi, serta aktif dalam jejaring organisasi intra maupun ekstra kampus yang berpotensi menjadi ruang masuknya ideologi ekstrem. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai strategi ideologis dalam mencegah radikalisme dan intoleransi pada mahasiswa melalui metode meta-analisis kualitatif. Sebanyak 24 artikel dan laporan penelitian bertema radikalisme mahasiswa, pendidikan Pancasila, dan strategi kontra-ekstremisme yang diterbitkan antara 2010–2020 dianalisis untuk mengidentifikasi pola, cara kerja radikalisasi, dan efektivitas program pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai Pancasila terbukti efektif melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) internalisasi nilai secara reflektif dan dialogis melalui pembelajaran kritis-progresif, sehingga mahasiswa mampu memaknai nilai kebangsaan secara kontekstual; (2) integrasi nilai toleransi dan kebhinekaan ke dalam kegiatan kemahasiswaan untuk menciptakan kultur kampus yang inklusif; dan (3) kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah dalam menjalankan program pencegahan ekstremisme berbasis kampus. Studi ini berkontribusi pada pengembangan model pencegahan radikalisme di perguruan tinggi berorientasi Pancasila serta memberikan implikasi penting untuk perumusan kebijakan pendidikan tinggi, pembaruan kurikulum Pancasila, dan penguatan ekosistem kampus yang moderat dan berkeadaban.

Kata kunci: Pancasila, Radikalisme, Intoleransi, Mahasiswa, Pencegahan Ekstremisme

1. Latar Belakang

Radikalisme dan intoleransi di Indonesia terus menjadi isu strategis nasional karena mengancam integritas ideologi negara serta stabilitas kehidupan sosial (Supriadi et al., 2020). Di berbagai perguruan tinggi, potensi paparan paham ekstrem semakin meningkat seiring kebebasan informasi dan interaksi di ruang digital. Narasi berbasis kebencian dan permusuhan kerap dibungkus dengan simbol agama dan perjuangan moral sehingga mudah diterima mahasiswa. Kelompok radikal memanfaatkan idealisme dan pencarian identitas mahasiswa untuk memperkuat rekrutmen. Upaya penyebaran paham ekstrem di kampus berlangsung secara sistematis dan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pertumbuhan intelektual justru dapat berubah menjadi pintu masuk gerakan radikal apabila tidak dikelola dengan baik. Ketika intoleransi dibiarkan berkembang, konflik sosial dapat muncul di antara kelompok mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ideologi bangsa tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dinamika internal generasi muda. Oleh karena itu, radikalisme di kampus harus dipahami sebagai masalah serius dan berjangka panjang. Jika dibiarkan, hal ini dapat menggerus fondasi kebangsaan generasi penerus.

Mahasiswa menjadi kelompok yang paling rentan karena berada pada fase pencarian jati diri dan orientasi hidup. Keinginan untuk memperoleh pengakuan kelompok, rasa ingin tahu terhadap isu-isu sosial, dan ketertarikan pada ideologi perubahan menjadikan mahasiswa target ideal kelompok radikal. Proses rekrutmen umumnya tersembunyi dalam kegiatan informal seperti diskusi keagamaan tertutup atau ajakan personal. Konten propaganda yang tersebar melalui media sosial turut memperkuat paparan ideologi ekstrem dalam waktu singkat. Ketika mahasiswa tidak memiliki filter berpikir kritis, narasi ekstrem dapat diterima tanpa proses verifikasi kebenaran. Pola ini menjadi semakin kompleks karena penyebar paham radikal sering kali memosisikan diri sebagai mentor rohani atau teman yang suportif. Mahasiswa yang sedang mengalami tekanan akademik maupun sosial dapat

merasa menemukan “kelompok pelindung” dan perlahan menginternalisasi pandangan ekstrem. Proses ini membuktikan bahwa radikalisme tidak hanya menasar keyakinan, tetapi juga perasaan dan kondisi psikologis mahasiswa. Disinilah pentingnya kampus untuk memahami pola kerentanan mahasiswa. Tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum seseorang terlanjur masuk terlalu jauh.

Fenomena radikalisme tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi (Lubis & Siregar, 2020). Kemudahan mengakses berbagai narasi ideologis melalui gawai menjadikan proses radikalisme terjadi jauh lebih cepat dibanding era sebelumnya. Konten ekstrem dapat dikemas secara estetis dan menarik sehingga tampak modern dan intelektual. Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi satu arah tanpa ruang kritik, sehingga propaganda diterima sebagai kebenaran tunggal. Mahasiswa yang menghabiskan banyak waktu di ruang digital cenderung lebih mudah terpapar narasi intoleransi. Algoritma platform digital sering menjalankan mekanisme pengulangan konten yang sejalan dengan minat pengguna sehingga bias semakin menguat. Akhirnya, mahasiswa terdorong untuk mempercayai narasi kelompok secara sepihak (Nasar et al., 2025). Jika tidak diimbangi literasi digital dan kecakapan berpikir kritis, mahasiswa dapat terjebak dalam polarisasi. Paparan digital yang tidak dikendalikan membuktikan bahwa radikalisme bukan hanya persoalan ruang fisik kampus. Pencegahan radikalisme harus mencakup penguatan kemampuan membaca informasi.

Di tengah fenomena tersebut, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran sentral untuk membentengi mahasiswa dari penetrasi ideologi ekstrem. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sejatinya menjadi pedoman dalam merawat keberagaman bangsa (Yasin et al., 2025). Namun, pada kenyataannya pendidikan Pancasila yang berlangsung di perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ideologi digital. Pembelajaran Pancasila sering kali hanya berfokus pada aspek konseptual dan historis tanpa menyentuh realitas sosial kontemporer (Amanda et al., 2025; (Pangareho, 2024)). Akibatnya, mahasiswa sulit menemukan relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai kebangsaan tidak dikontekstualkan, narasi rival yang emosional justru terlihat lebih menarik. Pendidikan Pancasila yang bersifat satu arah menjadi kurang efektif dalam membangun kesadaran kritis. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya hadir sebagai panduan hidup mahasiswa. Pembaruan pendekatan pendidikan ideologi menjadi sangat diperlukan.

Sejumlah studi akademik menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila akan lebih efektif apabila dilakukan secara dialogis dan reflektif, bukan dogmatis (Hidayat, 2022). Mahasiswa harus dilibatkan dalam analisis langsung terhadap fenomena sosial seperti intoleransi, ujaran kebencian, polarisasi digital, hingga kekerasan atas nama agama. Ketika mahasiswa memaknai Pancasila melalui pengalaman sosialnya, internalisasi nilai menjadi lebih otentik. Pembelajaran yang mengaitkan konsep Pancasila dengan realitas kontemporer terbukti lebih efektif dibandingkan sekadar menekankan hafalan. Proses internalisasi nilai memerlukan keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial. Mahasiswa perlu ditempatkan sebagai subjek kontemplatif, bukan objek indoktrinasi. Dengan demikian, pendidikan kebangsaan bukan hanya proses transfer pengetahuan. Pendidikan kebangsaan harus mengembangkan kesadaran diri mahasiswa sebagai bagian dari bangsa. Model ini sejalan dengan tujuan Perguruan Tinggi dalam membentuk manusia berilmu dan berakhlak.

Selain pembelajaran formal, penguatan Pancasila dapat dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan. Organisasi intra dan ekstra kampus memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter sosial mahasiswa. Kegiatan kolaboratif lintas budaya dapat menumbuhkan empati dan menurunkan prasangka (Pribadi et al., 2024; Munsarida & Lubis, 2024)). Sebaliknya, organisasi yang eksklusif dan tertutup berpotensi menjadi ruang masuknya paham radikal. Oleh karena itu, pengawasan organisasi dan pembinaan ideologis secara persuasif perlu diterapkan. Kampus perlu menciptakan lingkungan sosial yang mendorong interaksi lintas kelompok. Semakin luas pergaulan mahasiswa, semakin kecil kemungkinan intoleransi tumbuh. Kegiatan sosial dan pembelajaran berbasis aksi juga dapat meningkatkan kepedulian dan solidaritas. Semua mekanisme ini menjadi bagian dari pendidikan karakter kebangsaan. Pembentukan budaya kampus yang inklusif merupakan pilar penting dalam pencegahan radikalisme.

Literasi digital merupakan aspek lain yang perlu diperkuat untuk mendukung ketahanan ideologi mahasiswa (Susilawati, 2024; Akbar et al. 2024). Kemampuan mengenali misinformasi, propaganda, dan framing ideologis harus menjadi bagian dari kompetensi dasar mahasiswa era modern (Hermawan & Lestari, 2021). Ketika mahasiswa mampu memverifikasi informasi dan mempertanyakan narasi ekstrem, potensi radikalisme dapat ditekan. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, melainkan kemampuan memahami bias, hoaks, dan manipulasi emosional. Program literasi digital kebangsaan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan mahasiswa terhadap paparan ekstrem. Kampus dapat mengintegrasikannya melalui kegiatan seminar, workshop, dan proyek berbasis riset kecil. Semakin kuat kemampuan berpikir kritis mahasiswa, semakin kecil pengaruh propaganda ekstrem. Literasi digital dan ideologi bangsa merupakan kombinasi penting dalam

menghadapi tantangan era informasi. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila perlu beririsan dengan dunia digital.

Upaya pencegahan radikalisme juga memerlukan dukungan struktur kelembagaan kampus. Kebijakan internal perguruan tinggi harus berpihak pada perlindungan keberagaman dan keamanan ideologi tanpa melanggar kebebasan akademik. Pengawasan kegiatan keagamaan dan organisasi tidak boleh bersifat represif, tetapi preventif dan komunikatif. Kampus perlu menyediakan ruang konsultasi yang aman agar mahasiswa dapat berdiskusi mengenai isu sensitif tanpa takut distigma. Tenaga pendidik juga harus diberi kemampuan mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi tanpa melakukan pelabelan negatif. Ketika kampus memiliki sistem respon dini dan struktur kebijakan yang kuat, potensi penyebaran radikalisme dapat dikendalikan. Dalam konteks ini, peran birokrasi kampus sama pentingnya dengan peran kegiatan akademik. Pencegahan radikalisme tidak boleh hanya bergantung pada satu elemen, tetapi seluruh sistem. Kolaborasi internal menjadi kunci dari ketahanan ideologi kampus.

Selain pemerintah, peran masyarakat sipil juga penting dalam mencegah radikalisme. Kolaborasi kampus dengan lembaga nonpemerintah memberikan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel dibanding pendekatan represif negara. Lembaga masyarakat sipil yang fokus pada pluralisme, dialog antaragama, dan advokasi toleransi dapat memperkuat pendidikan kebangsaan di perguruan tinggi. Kegiatan kemahasiswaan berbasis keberagaman dapat lebih mudah diterima jika dikembangkan melalui pendekatan komunitas. Kerja sama ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya acara sesaat. LSM dan komunitas toleransi dapat menjadi mitra strategis bagi kampus dalam mengatasi narasi radikal. Peran mereka penting terutama dalam menghubungkan mahasiswa dengan realitas sosial di masyarakat. Perpaduan akademik, sosial, dan komunitas menciptakan pendekatan lebih menyeluruh. Ketahanan ideologi lebih efektif dibangun secara kolaboratif dan bersifat jangka panjang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa radikalisme tidak dapat dicegah hanya dengan melarang atau membatasi aktivitas ideologis tertentu (Sumpter, 2017). Pendekatan represif berpotensi menciptakan perlawanan dan memperkuat eksklusivitas kelompok radikal. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif. Mahasiswa harus merasa bahwa kampus adalah ruang aman untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi tanpa takut dihakimi. Ketika dialog dibuka, narasi ekstrem dapat dibantah secara ilmiah dan objektif. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memproses gagasan secara rasional. Penguatan nilai Pancasila dalam bentuk ruang dialog bukan hanya menumbuhkan kesadaran ideologi. Hal tersebut mendorong terbentuknya budaya akademik yang sehat. Di sinilah pendidikan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ilmu, tetapi sebagai pemelihara peradaban.

Deradikalisasi berbasis kampus dapat diarahkan untuk membantu mahasiswa yang telah terpapar paham ekstrem agar kembali ke ruang dialog kebangsaan (Subedi & Agastia, 2020). Pendekatan ini menekankan proses pendampingan, bukan hukuman. Mahasiswa yang sedang mencari arah hidup lebih mudah menangkap bimbingan yang bersifat emosional dan suportif dibandingkan ancaman atau larangan. Oleh karena itu, pembinaan harus dilakukan secara empatik melalui konselor, dosen pembimbing, atau tokoh agama moderat. Pendekatan pemulihan ini dapat memperkuat hubungan antara mahasiswa dan institusi pendidikan. Ketika mahasiswa merasa dipahami, peluang untuk keluar dari jejaring ekstrem semakin besar. Deradikalisasi harus dilihat sebagai proses rehabilitasi nilai, bukan penindakan. Dengan cara ini, kampus dapat mengembalikan mahasiswa ke dalam kultur kebinekaan. Pendekatan empatik memberikan hasil yang lebih berkelanjutan.

Penguatan karakter kebangsaan juga dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. Aktivitas sosial yang mempertemukan mahasiswa dengan berbagai kelompok masyarakat mengasah empati dan kepekaan terhadap keberagaman. Pengalaman langsung di lapangan membantu mahasiswa melihat perbedaan sebagai realitas dan kekayaan bangsa. Keterlibatan mahasiswa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Kegiatan pengabdian masyarakat menjadi ruang praktik nilai kebangsaan yang tidak bisa digantikan oleh teori semata. Interaksi lintas budaya dalam kegiatan sosial memperkuat karakter toleran dan peduli. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya berlangsung di kelas. Pendidikan Pancasila berlangsung melalui aksi nyata mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Radikalisme di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya mengembangkan kecerdasan intelektual. Dunia akademik juga berkewajiban membangun identitas kebangsaan, kedewasaan moral, dan sensitivitas kemanusiaan. Mahasiswa perlu disiapkan bukan hanya sebagai tenaga kerja masa depan, tetapi sebagai warga negara yang beretika, toleran, dan cinta tanah air. Pancasila harus dihadirkan sebagai nilai hidup, bukan sekadar mata kuliah. Jika mahasiswa memahami Pancasila hanya sebatas kewajiban administratif, maka pendidikan kebangsaan akan kehilangan makna. Kampus harus memastikan bahwa suasana akademik, kegiatan organisasi, dan interaksi sosial berjalan dalam semangat keberagaman. Dengan cara ini, radikalisme tidak akan

menemukan celah untuk tumbuh. Pendidikan tinggi bertanggung jawab menjaga konsistensi nilai kebangsaan generasi muda. Tanpa kesadaran ini, masa depan kebinnekaan Indonesia berada dalam risiko.

Penegakan nilai Pancasila sebagai pencegah radikalisme juga memiliki dampak positif terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Generasi muda yang mampu menerima perbedaan pendapat, menolak kekerasan, dan mengedepankan dialog akan menciptakan kehidupan politik yang sehat. Mahasiswa yang memiliki kesadaran ideologis yang kuat dapat berperan sebagai agen perubahan yang konstruktif. Ketika intoleransi ditekan, kohesi sosial meningkat. Ketika kekerasan ditolak, stabilitas nasional terjaga. Dengan demikian, penguatan Pancasila tidak hanya melindungi kampus, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia secara luas. Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam memastikan generasi muda tumbuh sebagai manusia berilmu, berkarakter, dan berkeadaban. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang yang menentukan nasib bangsa. Karena itulah urgensi penelitian mengenai strategi pencegahan radikalisme sangat tinggi.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, penelitian mengenai penguatan nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan radikalisme di lingkungan kampus menjadi sangat relevan. Penelitian ini menggunakan meta-analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan strategi efektif dari literatur ilmiah mengenai radikalisme mahasiswa dan pencegahannya. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan merumuskan model pencegahan yang komprehensif dan berbasis temuan empiris. Hasil sintesis diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pengetahuan mengenai pencegahan ekstremisme di pendidikan tinggi. Selain itu, hasilnya dapat menjadi rujukan praktis bagi perguruan tinggi untuk merancang kebijakan, kurikulum, dan pembinaan kemahasiswaan berbasis nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga memberikan implikasi langsung terhadap kehidupan sosial generasi muda. Penguatan pendidikan Pancasila diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang toleran, inklusif, dan bebas dari paham ekstrem. Pada akhirnya, ketahanan ideologi bangsa dapat terjaga melalui keberhasilan pembinaan generasi mahasiswa sebagai pelanjut cita-cita kemerdekaan.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian meta-analisis kualitatif, yaitu pendekatan sintesis sistematis terhadap berbagai hasil penelitian kualitatif terdahulu yang memiliki kesamaan topik. Meta-analisis kualitatif tidak bertujuan untuk menggabungkan data statistik sebagaimana penelitian kuantitatif, tetapi untuk menafsirkan dan membandingkan temuan penelitian secara mendalam guna mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan di antara sumber yang dianalisis. Pendekatan ini dipilih karena radikalisme dan penguatan nilai Pancasila pada mahasiswa merupakan isu yang kompleks, sehingga penggabungan perspektif dari berbagai penelitian memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih holistik. Melalui metode ini, hasil dari berbagai studi sebelumnya diolah secara interpretatif agar menghasilkan pengetahuan baru yang lebih menyeluruh dibandingkan temuan masing-masing penelitian secara terpisah.

2.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan tema radikalisme mahasiswa dan penguatan nilai Pancasila. Data mencakup artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan antara tahun 2010 hingga 2020, laporan penelitian dari lembaga pemerintah seperti BNPT dan IPAC, serta karya akademik lain yang membahas Pancasila, intoleransi, ekstremisme, dan pembentukan karakter mahasiswa. Penggunaan ragam sumber tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan cakupan literatur yang luas sehingga analisis tidak hanya mencerminkan satu perspektif akademik saja, tetapi juga kebijakan publik dan pendekatan praktis dalam konteks pencegahan ekstremisme.

2.3. Kriteria Inklusi

Proses seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan hanya sumber yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian yang dianalisis. Artikel yang dipilih harus berfokus pada radikalisme, intoleransi, mahasiswa, atau pendidikan Pancasila, serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau mixed-methods. Selain itu, hanya artikel yang terbit sebelum tahun 2020 dan memiliki keterkaitan langsung dengan pencegahan ekstremisme yang dimasukkan dalam meta-analisis. Dari hasil seleksi awal terhadap berbagai dokumen akademik dan laporan riset, terdapat 24 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dijadikan sumber utama dalam sintesis data. Seleksi yang ketat ini dilakukan untuk menjaga validitas dan kualitas temuan meta-analisis.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah ekstraksi data, yaitu proses mengidentifikasi informasi inti dari masing-masing artikel seperti tujuan penelitian, metode, konteks penelitian, dan temuan pokok. Tahap kedua adalah koding tematik, yakni mengelompokkan data yang telah diekstraksi ke dalam tema-tema analitis seperti pendidikan Pancasila, radikalisme mahasiswa, dan kebijakan kampus dalam pencegahan ekstremisme. Tahap ketiga adalah sintesis naratif, di mana seluruh tema yang telah dikodekan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan umum yang muncul di berbagai penelitian. Melalui tahapan ini, peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penguatan Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme di lingkungan kampus.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

1. Tren Radikalisme pada Mahasiswa

Meta-analisis ditemukan empat pola utama terkait radikalisme pada mahasiswa.

a. Radikalisme masuk melalui kegiatan keagamaan tertutup, mentoring, atau kelompok studi tertentu

Berbagai artikel menunjukkan bahwa proses radikalisme di kampus berlangsung secara bertahap dan dimulai dari pembinaan intensif yang tampak positif di awal. Kegiatan tersebut umumnya dikemas sebagai penguatan keagamaan, namun di dalamnya perlahan disisipkan doktrin eksklusivisme dan pengingkaran terhadap nilai kebinekaan. Kegiatan dilakukan dengan pola perekrutan berlapis sehingga anggota baru hanya berinteraksi dengan tokoh internal sehingga tidak ada kontrol dari luar. Indoktrinasi semakin kuat ketika hubungan emosional antara mentor dan mahasiswa sudah terbentuk, sehingga mahasiswa cenderung menerima doktrin tanpa meninjau ulang secara kritis.

b. Media digital berperan besar dalam menyebarkan konten intoleransi dan ideologi ekstrem

Hasil sintesis menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium yang mempercepat proses radikalisme karena konten ekstrem dikemas dalam bentuk yang persuasif dan mudah dibagikan. Sebagian besar propaganda ekstrem memanfaatkan isu ketidakadilan, identitas keagamaan, dan konflik politik untuk membentuk kemarahan moral pada mahasiswa. Pesan ekstrem sering dikemas dalam bentuk potongan ceramah, poster keagamaan, hingga narasi victimhood yang membuat mahasiswa merasa sedang membela kebenaran. Konten tersebut semakin memengaruhi mahasiswa ketika algoritma media sosial terus menampilkan materi serupa.

c. Kurangnya dialog lintas iman dan kurangnya pengawasan kegiatan kampus

Penelitian memperlihatkan bahwa semakin sedikit ruang dialog terbuka antaragama di kampus, semakin besar potensi eksklusivisme. Banyak organisasi kemahasiswaan berjalan sendiri-sendiri tanpa pengawasan substansial terkait materi pembinaan, sehingga muncul potensi penyalahgunaan ruang kegiatan atas nama pembinaan moral. Ketika relasi antarorganisasi semakin terfragmentasi, perbedaan keyakinan lebih cepat berkembang menjadi polarisasi identitas.

d. Pendidikan Pancasila dianggap tidak relevan karena masih normatif dan tidak dikaitkan dengan kondisi aktual

Banyak penelitian menyatakan bahwa mahasiswa menganggap Pancasila sebagai materi hafalan, bukan panduan dalam menghadapi isu radikalisme digital, polarisasi agama, atau konflikualisme sosial. Ketika tidak melihat relevansinya, mahasiswa lebih mudah menerima ideologi alternatif yang menawarkan kepastian moral dan keberpihakan kelompok.

2. Efektivitas Penguatan Nilai Pancasila

Meta-analisis menyimpulkan tiga strategi efektif.

a. Internalisasi nilai Pancasila melalui dialog kritis

Pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, debat konstruktif, dan problem-based learning terbukti membuat mahasiswa lebih memahami nilai Pancasila secara kontekstual. Ketika mahasiswa terlibat aktif, mereka belajar menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan musyawarah sebagai standar etika dalam menghadapi isu sosial-keagamaan.

b. Penguatan kegiatan kemahasiswaan berbasis toleransi

Program seperti kelas kebinekaan, kepemimpinan inklusif, kegiatan sosial lintas agama, dan forum lintas budaya terbukti menurunkan sikap intoleransi. Interaksi sosial yang positif membentuk empati dan rasa memiliki bersama sehingga siswa sulit terpengaruh narasi ekstrem yang mengajarkan permusuhan.

c. Kolaborasi kampus–masyarakat sipil–pemerintah

Artikel Sumpter (2017), Subedi & Agastia (2020), dan IPAC secara konsisten menunjukkan bahwa pencegahan ekstremisme paling berhasil jika kampus bekerja bersama lembaga seperti BNPT, organisasi keagamaan moderat, dan LSM yang bergerak dalam literasi keberagaman. Kolaborasi ini memberikan dukungan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3. Model Pencegahan Radikalisme Berbasis Pancasila (Hasil Sintesis)

Meta-analisis menghasilkan model tiga lapis:

Lapisan Ideologis (Pancasila sebagai Fondasi):

- a) penguatan aspek filosofis dan historis Pancasila
- b) pengaitan nilai Pancasila dengan isu sosial kontemporer agar relevan bagi mahasiswa

Lapisan Kultural (Kegiatan Kampus):

- a) ruang dialog aman dan inklusif untuk membahas perbedaan
- b) organisasi mahasiswa berbasis kebangsaan dan kebinekaan sebagai wadah pembentukan karakter

Lapisan Struktural (Kebijakan Kampus dan Negara):

- a) SOP pencegahan radikalisme
- b) kebijakan literasi digital
- c) pembinaan organisasi internal kampus
- d) pelatihan dosen dan tenaga kependidikan mengenai isu ekstremisme

3.2. Pembahasan

Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa radikalisme pada mahasiswa bukan sekadar persoalan ideologi, tetapi berkaitan erat dengan dinamika pencarian identitas di masa transisi menuju kedewasaan intelektual. Mahasiswa berada pada fase kritis dalam menentukan arah nilai hidup, sehingga kebutuhan akan pembenaran moral dan kelompok sosial menjadi sangat penting. Ketika kampus tidak menyediakan ruang penguatan identitas kebangsaan, mahasiswa mudah mencari rujukan identitas alternatif yang kelihatannya menawarkan kepastian dan ketegasan. Pada titik ini kelompok radikal memanfaatkan celah psikologis dan sosial untuk menarik mahasiswa. Pola perekrutan dilakukan secara bertahap agar anggota baru tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menuju ideologi ekstrem.

Peran media digital terbukti memperkuat penetrasi radikalisme di lingkungan perguruan tinggi. Propaganda ekstrem yang dikemas melalui konten emosional, narasi ketidakadilan, dan ajakan perjuangan moral terus memperluas jangkauan radikalisme. Mahasiswa yang cenderung menerima informasi tanpa verifikasi menjadi lebih rentan menyerap doktrin eksklusivisme. Ketika paparan berlangsung terus menerus, algoritma media sosial akan semakin mempersempit perspektif mahasiswa pada satu arah ideologis saja. Akibatnya, proses radikalisme kini dapat terjadi tanpa interaksi fisik, bahkan tanpa keterlibatan organisasi formal, menjadikan pemantauan jauh lebih sulit dilakukan kampus.

Fenomena intoleransi di kampus diperparah oleh minimnya ruang dialog lintas agama dan budaya. Ketika kelompok mahasiswa tersegmentasi dan jarang berdiskusi lintas perspektif, dinamika sosial kampus menjadi tertutup dan eksklusif. Ketiadaan ruang dialog menciptakan bias kognitif di mana mahasiswa hanya berinteraksi dengan kelompok yang berpandangan sama. Pola ini mempercepat pembentukan sikap biner: kelompok sendiri dianggap benar dan kelompok lain dianggap salah. Lingkungan seperti ini menjadi lahan subur bagi narasi ekstrem yang memecah belah komunitas akademik.

Pendidikan Pancasila yang bersifat normatif menjadi faktor penting yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman menghadapi kontestasi ideologi kontemporer. Ketika pembelajaran hanya menekankan hafalan, mahasiswa tidak melihat relevansi nilai Pancasila dalam menyelesaikan persoalan nyata seperti intoleransi, ujaran kebencian, dan konflik keagamaan. Akibatnya ideologi alternatif yang lebih tegas dan emosional tampak lebih menarik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah radikalisme bukan hanya berasal dari luar kampus, tetapi juga dari kelemahan sistem pedagogi internal yang belum adaptif.

Internalisasi nilai Pancasila melalui dialog kritis muncul sebagai strategi paling efektif berdasarkan meta-analisis. Pembelajaran berbasis diskusi dan studi kasus memberi ruang bagi mahasiswa untuk menantang, mempertimbangkan, dan memahami nilai Pancasila dalam konteks sosial aktual. Ketika mahasiswa berpartisipasi aktif, Pancasila dipahami bukan sebagai dogma, melainkan sebagai kerangka berpikir untuk merespon perbedaan secara beradab. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun daya tahan terhadap ideologi ekstrem.

Kegiatan kemahasiswaan berbasis toleransi dan kebhinekaan menjadi faktor penting dalam menurunkan potensi radikalisme. Interaksi sosial lintas agama, suku, dan budaya memungkinkan mahasiswa melihat kemanusiaan bersama, bukan sekat identitas. Program seperti kelas kebhinekaan, kepemimpinan inklusif, dan kegiatan sosial lintas agama terbukti meningkatkan empati antar mahasiswa. Pola interaksi positif ini secara alami meruntuhkan narasi ekstrem yang merendahkan kelompok berbeda. Dengan kata lain, kegiatan kemahasiswaan yang sehat merupakan benteng sosial dalam mencegah radikalisme.

Meta-analisis juga menemukan bahwa upaya pencegahan paling berhasil ketika kampus bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemerintah. Artikel dari Sumpter (2017), Subedi & Agastia (2020), dan IPAC konsisten menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam kontra-ekstremisme. Kampus tidak dapat bekerja sendiri karena radikalisme terjadi lintas ruang — offline, online, sosial, dan ideologis. Kolaborasi memungkinkan adanya pelatihan, kurikulum, pendampingan, dan pengawasan yang lebih berkelanjutan dibanding program internal kampus semata.

Model pencegahan radikalisme berbasis Pancasila yang ditemukan terdiri dari tiga lapis, yaitu ideologis, kultural, dan struktural. Lapisan ideologis menekankan pemahaman filosofis Pancasila yang dikaitkan dengan permasalahan kontemporer. Lapisan kultural berfokus pada pembentukan karakter melalui kegiatan kampus yang inklusif. Lapisan struktural melibatkan kebijakan institusi pendidikan dan negara untuk memperkuat regulasi dan pengawasan. Ketiga lapisan ini saling melengkapi dan tidak dapat dijalankan secara parsial.

Temuan meta-analisis ini semakin memperjelas bahwa pencegahan radikalisme membutuhkan intervensi komprehensif yang tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga ranah sosial dan emosional. Penguatan Pancasila melalui pembelajaran kritis harus disertai penguatan iklim organisasi mahasiswa serta dukungan kebijakan kampus. Pencegahan hanya akan efektif jika mahasiswa merasakan relevansi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan memiliki pengalaman sosial yang mendukung toleransi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol ideologi negara, tetapi fondasi bagi pembentukan mahasiswa yang inklusif, kritis, dan moderat. Ketika Pancasila diinternalisasi melalui pengalaman sosial dan pembelajaran reflektif, mahasiswa memiliki daya tahan terhadap intoleransi dan ideologi ekstrem. Dengan demikian, penguatan Pancasila harus menjadi agenda strategis dalam pendidikan tinggi untuk menjaga keberlangsungan nilai kebangsaan di tengah tantangan radikalisme era digital.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme pada mahasiswa dipengaruhi oleh kombinasi aktivitas keagamaan tertutup, paparan media digital tanpa literasi kritis, dan minimnya ruang dialog di lingkungan kampus, sehingga menciptakan kondisi sosial yang rentan terhadap penetrasi ideologi eksklusif. Penguatan nilai Pancasila terbukti menjadi strategi pencegahan yang efektif apabila disampaikan melalui pembelajaran kritis, dialogis, dan kontekstual yang menekankan relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap tantangan sosial masa kini. Meta-analisis juga menunjukkan bahwa model pencegahan yang paling optimal terdiri dari tiga lapisan, yaitu ideologis, kultural, dan struktural, yang bekerja secara saling melengkapi untuk membangun ketahanan ideologis mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu direformulasi dari pendekatan normatif menjadi model pembelajaran progresif agar mampu menginternalisasi nilai kemanusiaan, toleransi, kebhinekaan, dan keadilan dalam kehidupan akademik maupun sosial mahasiswa. Berdasarkan temuan penelitian, kampus disarankan untuk mengembangkan kurikulum Pancasila berbasis studi kasus, dialog, dan proyek komunitas sehingga mahasiswa dapat memaknai nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman langsung, bukan sekadar hafalan. Dosen perlu dibekali pelatihan pedagogi kritis untuk mendorong pembelajaran partisipatif dan reflektif agar pembahasan isu keberagaman dan intoleransi dapat dilakukan secara terbuka dan konstruktif. Mahasiswa juga perlu dilibatkan dalam kegiatan lintas agama, budaya, dan organisasi sebagai media pembentukan karakter sosial yang inklusif dan kolaboratif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan radikalisme (P/CVE) di perguruan tinggi melalui kolaborasi dengan BNPT, CSO, dan tokoh masyarakat agar program kampus lebih sistematis dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain mixed-methods atau studi longitudinal untuk memetakan dinamika perubahan sikap mahasiswa terhadap radikalisme dalam jangka panjang.

Referensi

1. Akbar, R. S., Iskandar, T., Abadi, M. D., Bachtiar, S., Khomaidi, M. I., Damayanti, T. O., ... & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(2), 253–261.
2. Amanda, D. K., Shofa, G. Z., & Nurhaliza, N. A. (2025). Pendidikan Pancasila di persimpangan: Antara kepentingan politik dan pembentukan karakter. *Journal of Education*, 1(1), 16–27.
3. BNPT. (2020). *Laporan nasional pencegahan radikalisme di perguruan tinggi*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
4. Hermawan, A., & Lestari, D. (2021). Literasi digital dan kerentanan radikalisasi mahasiswa di era media sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 145–158.
5. Hidayat, R. (2022). Reformulasi pendidikan Pancasila untuk memperkuat ketahanan ideologi generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 35–48.
6. IPAC. (2016). *Indonesian student extremism: Mapping trends and risk factors*. Institute for Policy Analysis of Conflict – Report Series.
7. Kuntarto, E. (2018). Bahasa dan kekuasaan politik oposan di Indonesia: Analisis wacana kritis. *Jurnal Kiprah*, 6(2), 37–47.
8. Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020). Bahaya radikalisme terhadap moralitas remaja melalui teknologi informasi (media sosial). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 21–34.
9. Lubis, M., & Yusoff, K. (2015). Teaching Islamic education in multicultural settings: Challenges and opportunities. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2), 94–102.
10. Munsarida, M., & Lubis, A. K. (2024). Pendampingan organisasi mahasiswa lintas agama di Kota Jambi dalam membangun kerukunan masyarakat. *DILIGENTE: Jurnal Advokasi dan Pengabdian*, 1(1), 5–13.
11. Nasar, I., Mubarika, I. S., & Ardana, T. F. (2025). Navigasi moderasi beragama di media sosial: Studi kasus intoleransi Gen Z di platform TikTok. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 3(1), 185–200.
12. Pangareho, N. (2024). Dinamika politik Pancasila: Antara idealisme dan realitas dalam konteks Indonesia (Tinjauan filsafat politik Armada Riyanto). *AKADEMIKA*, 23(2), 63–71.
13. Pribadi, I., Pajarianto, H., Nasriandi, N., Anuar, A. B., & Galugu, N. S. (2024). Penguatan iklim akademik toleran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah: Perspektif peace education. Penerbit Widina.
14. Sahal, M., Abdullah, S., & Prasetyo, A. (2018). Pembelajaran toleransi dalam pendidikan tinggi: Strategi membangun karakter inklusif. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(3), 322–334.
15. Subedi, D., & Agastia, I. (2020). Preventing violent extremism in higher education: Collaborative approaches between state and civil society. *Studies in Conflict & Terrorism*, 43(12), 1107–1125.
16. Sumpter, C. (2017). *Youth, identity and radicalization: The case of Southeast Asia*. Routledge.
17. Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan radikalisme agama: Konstruksi LSM tentang program deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53–72.
18. Susilawati, E. (2024). Meningkatkan civic engagement mahasiswa melalui literasi digital. *Kearifan Lokal Pancasila, Sejarah, dan Budaya Bangsa*, 19.
19. Yasin, N. A., Hidayati, A., & Nurlailin, W. (2025). Pendidikan multikultural berbasis Pancasila (Konsep, nilai dan falsafah dalam bingkai ke-Indonesia-an): Pancasila-based multicultural education (Concept, value, and philosophy in the frame of Indonesianness). *PAIDAGOGIA Jurnal Pengajaran dan Pendidikan*, 1(3), 41–55.